

Pimpin SMAN 1 Baubau, Samsuriati Prioritaskan Disiplin dan Kebersihan Lebih Dulu, Kemudian Siapkan Pemulihan Prestasi Hingga Tingkat Nasional



Kepala SMA Negeri 1 Baubau Samsuriati AH, S.Pd., M.M

Laporan: Firman

BAUBAU, BP-Kepala SMA Negeri 1 Baubau Samsuriati AH, S.Pd., M.M., memprioritaskan pembenahan kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan sekolah pada bulan pertama masa kepemimpinannya. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kedisiplinan warga sekolah sekaligus

memulihkan prestasi akademik dan nonakademik agar kembali mampu bersaing di tingkat nasional. Samsuriati mulai bertugas pada 28 September 2026 setelah dilantik pada 21 September dan menjalani serah terima jabatan di Aula SMA Negeri 1 Baubau pada 26 September 2026. Prioritas pembenahan lingkungan

Lanjut ke Hal: 7

Kepala Kantah Buton Selatan Asnani Tekankan Aspek Pertanahan dalam Pembahasan KA-ANDAL Sekolah Rakyat



Kepala Kantah Buton Selatan Asnani Tekankan Aspek Pertanahan dalam Pembahasan KA-ANDAL Sekolah Rakyat

KORAN BAUBAU POST
www.baubaupost.com

Laporan: Ardi

BUTON SELATAN, BP-Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Buton Selatan, Asnani, S.P., M.M., mengingatkan pentingnya kepastian status tanah dalam rencana pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Buton Selatan yang rencananya pembangunannya berlokasi

Lanjut ke Hal: 7

Meriahkan HUT Baubau ke 485, Dinas Perikanan Gelar Lomba Dayung Koli-koli dan Perahu Hias, 71 Peserta Sudah Mendaftar

Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP - Sebanyak 71 peserta mendaftar untuk mengikuti Lomba Dayung Koli-koli dan Lomba Perahu Hias yang digelar Dinas Perikanan Kota Baubau dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-485 Kota Baubau dan 25 tahun sebagai daerah otonom. Kedua perlombaan dijadwalkan berlangsung pada Senin, 12 Oktober 2026, mulai pukul 13.00 WITA di



kawasan Kota Mara, Baubau.

Jumlah tersebut terdiri atas 46 peserta lomba dayung koli-koli dan 25 peserta lomba

perahu hias. Pendaftaran berlangsung pada 1-9 Oktober 2026. Antusiasme ini menunjukkan bahwa kegiatan berbasis tradisi bahari

masih memiliki daya tarik bagi masyarakat, terutama warga pesisir yang memiliki kedeka-

Lanjut ke Hal: 7

Pembangunan Tiga Gedung Baru di RSUD Buton Selatan Dikebut Selesai Desember 2026, Layanan Jantung dan Kanker Disiapkan, Alat Medis Datang Tahun 2027

dr. DENDRI BRAMANTI
Direktur RSUD Buton Selatan

3 GEDUNG BARU
CT SCAN
CAT LAB
SITOTOKSIK

TARGET RAMPUNG: NOV-DES 2026

ALAT MEDIS DIRANCANG TIBA 2027

DOKTER SPESIALIS MASIH DISIAPKAN

Laporan: Firman, Baubau Post-Durasi Times

BUTON SELATAN, BP-Warga Kabupaten Buton Selatan diharapkan dapat memperoleh layanan kesehatan lanjutan tanpa harus menjalannya rujukan ke Baubau dalam dua tahun mendatang. Harapan itu menyusul pembangunan tiga gedung baru di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buton Selatan yang dibiayai

Direktur RSUD Buton Selatan, dr. Dendri Bramanti, mengatakan fasilitas yang dibangun meliputi gedung CT Scan untuk pelayanan radiologi, gedung CAT Lab untuk penanganan penyakit jantung dan saraf, termasuk stroke, serta gedung Sitotoksik untuk pengelolaan obat penanganan kanker. Kehadiran fasilitas tersebut ditujukan untuk memperluas kemampuan rumah sakit dalam menangani pasien di daerah sendiri.

Pembangunan ketiga gedung dimulai

Lanjut ke Hal: 7

Cegah Korupsi, Kajati Sultra Dr Sugeng Riyanta Tekankan Integritas dan Pengawasan Pembangunan di Buton Tengah



Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP-Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Sugeng Riyanta menekankan pentingnya mitigasi risiko hukum sejak tahap perencanaan untuk mencegah penyimpangan anggaran dan memperkuat akuntabilitas pembangunan di Kabupaten Buton Tengah. Penguatan itu disampaikan dalam pembekalan tata kelola pemerintahan di Aula Pancana, Lantai V Kantor Bupati Buton Tengah, Rabu (7/10/2026).

Dalam kegiatan

bertema Pencegahan, Perbaikan Tata Kelola dan Mitigasi Risiko Hukum pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah tersebut, Sugeng mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari kelengkapan dokumen administrasi. Setiap kebijakan dan program harus memiliki sasaran yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, serta menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kata kuncinya adalah kepemimpinan yang tegas, tata kelola yang baik, pen-

awasan yang kuat, mitigasi risiko sejak perencanaan, dan integritas dalam setiap pelaksanaan,” tegas Sugeng di hadapan jajaran pemerintah daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dan kepala desa se-Kabupaten Buton Tengah.

Ia menjelaskan, pengendalian risiko perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pekerjaan, pembayaran, pemanfaatan hasil

Lanjut ke Hal: 7

Prabowo Bidik Operasional 100 Kampung Nelayan di Akhir tahun 2026, Fasilitas Terpadu Disiapkan



Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Jumat (9/10).

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP- Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan pembangunan 100 Kampung Nelayan yang ditargetkan rampung dan siap beroperasi pada akhir 2026. Program tersebut disiapkan dengan dukungan dermaga, pabrik es, fasilitas penyimpanan dingin, dan pasar untuk memperkuat rantai usaha perikanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Permintaan itu disampaikan Prabowo saat menerima Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Jumat (9/10/2026).

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas perkembangan pembangunan 100 Kampung Nelayan. Menurut dia, Presiden meminta pembaruan informasi mengenai

pelaksanaan program yang menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor kelautan dan perikanan.

“Dalam pertemuan tersebut, Presiden meminta update perkembangan pembangunan 100 Kampung Nelayan yang tengah dipersiapkan pemerintah,” kata Teddy dalam keterangannya.

Infrastruktur yang direncanakan mencakup dermaga untuk menunjang aktivitas nelayan, pabrik es untuk membantu mempertahankan kualitas hasil tangkapan, serta cold storage atau fasilitas penyimpanan dingin. Pemerintah juga menyiapkan pasar agar nelayan memiliki sarana untuk melakukan transaksi dan memasarkan hasil laut.

Ketersediaan fasilitas tersebut diharapkan memperkuat mata rantai usaha perikanan, mulai dari penangkapan, penanganan dan penyimpanan hasil tangkapan, hingga distribusi serta pemasaran. Dengan dukungan infrastruktur itu, hasil tangkapan

diharapkan dapat ditangani secara lebih baik sebelum sampai kepada konsumen.

Program ini memiliki relevansi dengan persoalan klasik perikanan skala kecil, yakni keterbatasan sarana penyimpanan dan pemasaran. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) dalam kajiannya mengenai kehilangan hasil perikanan pasca panen yang diterbitkan pada 2010 mengidentifikasi kerusakan mutu dan kehilangan hasil sebagai persoalan yang dapat terjadi sepanjang rantai pasok, dari penangkapan hingga konsumsi.

Di Indonesia, penguatan ekonomi masyarakat nelayan juga menjadi agenda pemerintah sebelum target 100 kampung tersebut disampaikan pada Oktober 2026. Sekretaris Negara pada 15 Oktober 2025 memublikasikan program Desa Nelayan yang diarahkan untuk memberdayakan masyarakat pesisir dan meningkatkan

kesejahteraan nelayan. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyoroti perlunya program yang efektif untuk memberdayakan komunitas nelayan.

Teddy menyatakan pembangunan Kampung Nelayan ditujukan untuk memperkuat ekosistem kelautan dan perikanan sekaligus memperluas akses masyarakat pesisir terhadap infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi. Program tersebut diharapkan tidak hanya menyediakan sarana fisik, tetapi juga mendukung keterhubungan nelayan dengan pasar.

Pemerintah menargetkan seluruh 100 Kampung Nelayan yang dimaksud dapat rampung dan siap beroperasi hingga akhir 2026. Namun, rincian lokasi pembangunan, tahapan penyelesaian setiap kawasan, besaran anggaran, serta indikator capaian program belum dijelaskan dalam keterangan yang menjadi sumber berita ini. (*)

DPD RI Kawal Temuan BPK, Masalah Berulang Keuangan Daerah Jadi Sorotan Nasional



DPD RI bakal menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal masalah berulang yang dihadapi keuangan daerah.

Laporan: Radit

JAKARTA, BP- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai persoalan berulang dalam pengelolaan keuangan daerah. Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan rekomendasi pemeriksaan menghasilkan perbaikan nyata, bukan sekadar menjadi catatan administratif.

Komitmen itu mengemuka setelah DPD RI menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2026 dalam Sidang Paripurna Ke-3 DPD RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Kamis (8/10/2026).

Anggota VI BPK RI Fathan Subchi menjelaskan, penyampaian hasil pemeriksaan kepada DPD RI memiliki landasan konstitusional dalam Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut mengatur penyampaian hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada lembaga perwakilan.

Fathan menekankan pentingnya menjadikan hasil pemeriksaan sebagai instrumen pembenahan tata kelola keuangan negara. Persoalan yang muncul berulang kali, khususnya di tingkat daerah, perlu ditangani melalui langkah korektif agar tidak terus menjadi masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Hasil pemeriksaan tidak sekadar menjadi catatan ad-

ministrasi, tetapi dapat mendorong perbaikan pengelolaan keuangan negara, menyelesaikan persoalan daerah yang berulang,” ujar Fathan.

Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin meminta seluruh anggota DPD RI memanfaatkan laporan BPK sebagai bahan evaluasi sekaligus dasar koordinasi dengan pemerintah daerah. Menurut dia, tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan perlu diarahkan pada penyelesaian persoalan secara konkret sesuai kewenangan masing-masing pihak.

“Hasil pemeriksaan tersebut harus menjadi bahan bagi DPD RI untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI,” kata Sultan dalam keterangannya, Jumat (9/10/2026).

Ia juga mengingatkan bahwa persoalan pemerintahan daerah tidak dapat dipisahkan dari kepentingan nasional. Kualitas pengelolaan anggaran, pelaksanaan program, dan pertanggungjawaban keuangan di daerah berkaitan dengan pelayanan publik serta manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.

Dalam pandangan Sultan, pembangunan nasional akan lebih kuat apabila berjalan beriringan dengan kemajuan daerah. Karena itu, pengawasan terhadap keuangan daerah tidak cukup berhenti pada identifikasi masalah, tetapi harus diikuti upaya pembenahan yang ter-

ukur dan berkelanjutan.

“Dalam semangat ‘dari daerah untuk Indonesia’, kemajuan nasional harus tumbuh bersama kemajuan daerah. Daerah yang berdaya akan memperkuat Indonesia,” ujarnya.

Secara historis, pengawasan atas pengelolaan keuangan negara telah memperoleh landasan konstitusional sejak perubahan ketiga UUD 1945 pada 2001, yang memperkuat pengaturan mengenai BPK melalui Pasal 23E. Ketentuan tersebut menegaskan kedudukan BPK sebagai lembaga pemeriksa yang bebas dan mandiri. Dalam konteks internasional, prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan independen atas keuangan publik juga menjadi bagian penting tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip tersebut menempatkan tindak lanjut rekomendasi audit sebagai unsur penting untuk memperbaiki pengelolaan anggaran.

Dengan diterimanya laporan pemeriksaan semester pertama 2026, DPD RI diharapkan dapat menjalankan fungsi representasi daerah melalui koordinasi yang lebih efektif dengan pemerintah daerah. Tantangan berikutnya ialah memastikan persoalan yang berulang dapat diidentifikasi penyebabnya, ditangani sesuai rekomendasi, dan tidak kembali muncul dalam pemeriksaan berikutnya. (*)

Muhammadiyah Buka Sekolah Agraria di Sultra, Gubernur ASR Tekankan Integritas



Laporan: Mashuri

SULTRA, BP- Per-soalan ketimpangan penguasaan lahan, konflik agraria, dan dampak ekspansi investasi menjadi perhatian dalam pembukaan Sekolah Agraria Regional Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Bali (SeNusaBa) di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (8/10/2026). Dalam kegiatan yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menekankan pentingnya integritas, kebenaran, dan kebaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan yang berangkat dari kebutuhan masyarakat.

Program SeNusaBa dirancang sebagai ruang pendidikan, pelatihan, dan kaderisasi untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai persoalan agraria. Kegiatan yang dipusatkan di Aula Garuda Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sultra itu melibatkan peserta dari kawasan Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Bali. Pembahasannya mencakup kebijakan pertanahan, ketimpangan penguasaan lahan, konflik agraria, perlindungan lingkungan hidup, serta mekanisme penyelesaian sengketa.

Mengusung tema “Membaca Ulang Pembangunan, Membela Ruang Hidup: Keadilan Agraria di Tengah Ekspansi Investasi dan Proyek

Strategis Nasional”, seminar tersebut menyoroti pentingnya menempatkan kepentingan masyarakat dalam proses pembangunan. Gubernur menilai, kebijakan yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan kebutuhan warga berisiko tidak menjawab persoalan yang terjadi di lapangan.

“Tidak ada pembangunan itu top down (dari atas ke bawah). Kita ingin bottom up (dari bawah ke atas), sehingga apa yang kita bangun itu berdasarkan kejujuran, bukan karena keinginan,” kata Andi Sumangerukka dalam arahannya.

Ia menjelaskan, visi Sulawesi Tenggara yang maju, aman, sejahtera, dan religius menjadi landasan dalam menjalankan pemerintahan. Menurut dia, prinsip kebenaran dan kebaikan harus menjadi pedoman dalam mengambil keputusan, sementara integritas diperlukan agar kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. “Saya hanya memegang dua prinsip dalam memimpin, yaitu kebenaran dan kebaikan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Andi Sumangerukka juga menyampaikan komitmen mendukung peningkatan akses pendidikan bagi mahasiswa. Ia mengatakan sebagian hak yang diterimanya sebagai kepala daerah akan dihibahkan untuk mendukung beasiswa. “Sudah bertekad ingin mengabdikan kepada masyarakat Sultra. Salah

satunya, uang operasional dan gaji saya, saya hibahkan untuk pendidikan demi adik-adik mahasiswa untuk beasiswa,” ujarnya. Ia turut menyebut keterlibatan tim pendamping dari kalangan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yang diharapkan dapat membantu pemerintah daerah melalui keahlian dan kapasitas keilmuan.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah M. Busyro Muqoddas menekankan pentingnya nilai kebangsaan, demokrasi, hukum, dan kemanusiaan dalam tata kelola pemerintahan. Ia mendorong kerja sama antara pemerintah, Muhammadiyah, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk memperkuat keadilan sosial, termasuk dalam penanganan persoalan agraria. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar pembahasan mengenai tanah dan ruang hidup masyarakat dapat berlanjut menjadi langkah nyata.

Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara Junaidin Pagala berharap seminar dan Sekolah Agraria menjadi ruang untuk merumuskan gagasan serta memperkuat kerja sama antar-pemangku kepentingan. Ia menekankan bahwa kegiatan semacam ini perlu menghasilkan tindak lanjut yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan berhenti pada pertukaran pandangan di forum diskusi.

Persoalan agraria

sendiri memiliki akar sejarah panjang dalam pembangunan Indonesia. Pada 24 September 1960, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA, yang menjadi landasan utama hukum agraria nasional. Regulasi tersebut antara lain menempatkan bumi, air, dan kekayaan alam sebagai unsur penting bagi kehidupan bangsa serta mengarahkan pengaturan agraria untuk mendukung keadilan dan kemakmuran rakyat. Sejarah hukum ini menjadi konteks penting bagi pembahasan mengenai kepastian hak atas tanah, distribusi penguasaan lahan, dan penyelesaian konflik agraria hingga kini.

LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyelenggarakan Sekolah Agraria sebagai program penguatan kapasitas, bukan pendirian sekolah formal atau pembangunan gedung pendidikan baru. Melalui pembelajaran, diskusi, pelatihan, dan konsolidasi, peserta diarahkan untuk memahami sejarah serta struktur persoalan agraria Indonesia, perspektif Islam dan Muhammadiyah mengenai agraria, regulasi pertanahan, dan mekanisme penyelesaian konflik. Melalui pelaksanaan regional SeNusaBa di Sulawesi Tenggara, program tersebut diharapkan memperluas pemahaman dan memperkuat kontribusi berbagai pihak dalam mendorong keadilan agraria. (*)

Website Seluruh OPD Sultra Sudah Tersedia, Diskominfo Dorong Optimalisasi



Laporan: Lisna

SULTRA, BP - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) memasuki tahap penguatan pemanfaatan layanan digital setelah seluruh perangkat daerah memiliki website resmi berdomain sultraprov.go.id sejak triwulan pertama 2026. Namun, kelengkapan situs belum sepenuhnya diikuti pengelolaan informasi yang aktif, pembaruan berkala, dan konsistensi penggunaan domain resmi pemerintah.

Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Domain dan Subdomain Perangkat Daerah Lingkup Pemprov Sultra di Kendari, Kamis (8/10/2026). Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sultra, Andi Syahrir, menilai website pemerintah perlu dioptimalkan sebagai sarana penyampaian informasi publik, penyediaan data sektoral, dan akses terhadap layanan masing-masing perangkat daerah.

Penggunaan domain resmi, menurut Andi, juga berkaitan dengan identitas digital pemerintah, keamanan informasi, dan kepercayaan masyarakat. Ia meminta seluruh organisasi perangkat

daerah (OPD) memastikan situs mereka dikelola secara tertib, memuat informasi yang relevan, serta diperbarui secara berkala. “Kita ingin memastikan website pemerintah dikelola secara tertib, aman, dan aktif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan,” kata Andi.

Asisten Pemerintahan dan Kesjahteraan Sultra, Pahri Yamsul, yang membuka rapat tersebut, menekankan pentingnya kejelasan penanggung jawab setiap website, inventarisasi domain dan subdomain, serta peningkatan keamanan dan keandalan layanan digital. Koordinasi dengan Diskominfo Sultra juga diperlukan agar pengelolaan situs antarlembaga lebih terarah dan mendukung pelayanan publik yang mudah diakses.

Pahri mengingatkan bahwa pengelolaan domain pemerintah tidak semestinya dipandang sebagai pekerjaan teknis administrator semata. “Melalui rapat koordinasi dan evaluasi ini, diharapkan terbangun komitmen bersama seluruh perangkat daerah untuk mewujudkan layanan digital Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang semakin tertata, terintegrasi, aman, dan

mudah diakses masyarakat,” ujarnya.

Penguatan tersebut sejalan dengan perjalanan kebijakan digital pemerintahan di Indonesia. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kerangka ini mengempatkan integrasi sistem, tata kelola, dan peningkatan kualitas pelayanan sebagai bagian penting dari transformasi digital.

Dalam rapat itu juga disampaikan bahwa evaluasi pemerintahan digital mulai 2026 beralih dari penggunaan istilah Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintahan Digital (PemDi). Perubahan orientasi tersebut menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak cukup dinilai dari banyaknya aplikasi atau inovasi teknologi, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Karena itu, keberadaan website resmi perlu diikuti informasi yang akurat, layanan yang berfungsi, dan akses yang mudah bagi publik. (*)

Bupati Buton Tengah Azhari Bahas HDI 2026, Layanan Sosial bagi Disabilitas Jadi Perhatian



Laporan:Ardi

BUTON TENGAH, BP- Kabupaten Buton Tengah direncanakan menjadi lokasi penyelenggaraan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2026 tingkat Sulawesi Tenggara pada Desember mendatang. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah bersama Sentra “Meohai” Kendari Kementerian Sosial RI mulai membahas persiapan kegiatan tersebut dalam pertemuan di Rumah Jabatan Bupati Buton Tengah, Kamis (8/10/2026), dengan menitikberatkan perhatian pada pelayanan dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas serta lanjut usia.

Peringatan tersebut direncanakan menghadirkan sejumlah layanan bagi kelompok sasaran, mulai dari asistensi rehabilitasi sosial atau atensi, pemeriksaan kesehatan, fisioterapi, hingga penyaluran bantuan sosial. Panitia juga merencanakan pameran produk karya penyandang disabilitas dan lansia serta pertunjukan kesenian sebagai ruang untuk memperlihatkan kreativitas dan kemampuan mereka.

Rencana penyelenggaraan itu tercantum dalam surat Sentra Meohai Kendari Nomor 884/4.36/RH.00.01/10/2026 tertanggal 5 Oktober 2026. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan HDI 2026 di wilayah kerja Sentra Meohai Kendari

direncanakan berlangsung di Kabupaten Buton Tengah pada Desember 2026, dengan Gedung Serbaguna SRT Buton Tengah sebagai lokasi yang direncanakan.

Pembahasan persiapan dipimpin Kepala Tata Usaha Sentra Meohai Kendari, Sri Indrawati. Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara Kementerian Sosial dan pemerintah daerah agar kegiatan yang direncanakan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan pelayanan sosial secara lebih luas.

Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, menyambut baik rencana pelaksanaan HDI 2026 di daerahnya. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Sentra Meohai Kendari selama ini dalam membantu warga yang membutuhkan penanganan sosial, termasuk pemberian bantuan awal kepada masyarakat yang terdampak musibah, seperti kebakaran.

Azhari menilai keberadaan SR di Buton Tengah turut memperkuat sinergi pemerintah daerah dengan Kementerian Sosial dalam memberikan pelayanan dan perlindungan sosial. Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya mendukung kegiatan peringatan HDI, tetapi juga membantu masyarakat yang memerlukan bantuan dan pendampingan secara berkelanjutan.

Secara internasional, Hari Penyandang Disabilitas Internasional diperingati setiap 3 Desember. Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan peringatan tersebut melalui Resolusi Majelis Umum 47/3 pada 14 Ok-

tober 1992. Peringatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman tentang persoalan disabilitas serta mendorong penghormatan terhadap hak, martabat, dan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Di Indonesia, perlindungan hak penyandang disabilitas diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Regulasi tersebut menjadi landasan penting bagi pemenuhan hak, perlindungan, dan kesempatan berpartisipasi bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Karena itu, penyelenggaraan HDI dapat menjadi momentum untuk memperkuat pelaksanaan prinsip inklusi di tingkat daerah.

Melalui rencana kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dan Sentra Meohai Kendari diharapkan dapat memperluas akses terhadap layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan, serta ruang partisipasi bagi penyandang disabilitas dan lansia. Meski demikian, jadwal dan lokasi final pelaksanaan HDI 2026 masih perlu dikonfirmasi oleh penyelenggara.(*)

Bupati Buton Alvin Akawijaya Bahas Usulan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat



Laporan:La Harman

BUTON, BP-Pemerintah Kabupaten Buton membahas usulan pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat melalui rapat justifikasi teknis yang dipimpin Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, S.H., di Aula Bupati Buton, Kompleks Perkantoran Takawa, Kamis (1/10/2026). Pembahasan tersebut melibatkan tim teknis dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai bagian dari proses penilaian usulan.

Rapat itu diarahkan untuk membahas aspek teknis pembangunan dan revitalisasi pasar, termasuk proses tinjauan langsung di lapangan. Hasil pembahasan diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan pasar rakyat di Kabupaten Buton.

Alvin meminta seluruh pihak mengikuti pembahasan secara kondusif agar proses penilaian berjalan baik dan tujuan pembangunan dapat tercapai. “Diskusi

hari ini saya harap bisa berjalan dengan kondusif demi tujuan ini tercapai,” ujar Bupati.

Ia juga menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap tahapan pembahasan. Menurut Alvin, pemerintah daerah berupaya memberikan hasil terbaik bagi warga Buton sehingga proses pengambilan keputusan perlu dijalankan tanpa kepentingan tertentu.

“Masyarakat juga diharapkan tulus tanpa kepentingan apapun, karena kami pemerintah berusaha sebaik mungkin untuk masyarakat Buton,” ungkapnya.

Pelibatan tim dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian PUPR menandakan aspek teknis sebagai bagian penting dalam pembahasan usulan tersebut. Namun, informasi mengenai pasar yang menjadi sasaran, jumlah lokasi, kebutuhan anggaran, serta jadwal pelaksanaan belum dirinci dalam keterangan yang tersedia.

Secara nasional, pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat telah menjadi bagian dari ke-

bijakan penguatan ekonomi kerakyatan. Pada 2015-2019, pemerintah menargetkan pembangunan atau revitalisasi 5.000 pasar rakyat. Kementerian Perdagangan mencatat sebanyak 4.211 pasar telah dibangun atau direvitalisasi hingga 2018 melalui pendanaan yang antara lain bersumber dari dana alokasi khusus dan tugas pembantuan. Data historis tersebut menunjukkan bahwa pembenahan pasar telah lama menjadi agenda pembangunan nasional.

Revitalisasi pasar juga tidak semata-mata berkaitan dengan pembenahan bangunan. Kementerian Perdagangan pada 2026 menekankan pentingnya pasar yang bersih, aman, nyaman, dan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperkuat ekonomi daerah. Karena itu, pembahasan teknis di Buton menjadi salah satu tahapan yang perlu dicermati untuk memastikan usulan pembangunan dan revitalisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.(*)

Baubau Perkuat Pencegahan Stunting lewat Digitalisasi Aplikasi REMILA Surveilans Kesehatan Remaja



Baubau Perkuat Pencegahan Stunting lewat Digitalisasi Aplikasi REMILA Surveilans Kesehatan Remaja

KORAN BAUBAU POST www.durasitimes.com

Peliput: Andina L

BAUBAU, BP- Digitalisasi pemantauan kesehatan remaja mulai diperkuat di Kota Baubau melalui evaluasi aplikasi REMILA. Dinas Kesehatan Kota Baubau bersama tim peneliti menggelar monitoring dan evaluasi (monev) penelitian terapan untuk menilai perkembangan pencatatan serta pelaporan kesehatan remaja di posyandu dan sekolah, Rabu (7/10/2026), di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Baubau.

Program tersebut diarahkan untuk menghasilkan data kesehatan yang dapat digunakan dalam merumuskan intervensi gizi secara lebih terukur. Pemantauan mencakup status gizi, prevalensi anemia, kasus Kurang Energi Kronis (KEK), hingga kepatuhan konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD), yang menjadi bagian dari upaya memperkuat kesehatan remaja sebelum memasuki usia reproduksi.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Baubau, Djainuddin Ishak, S.Si., Apt., M.Si., yang membu-

ka kegiatan mewakili Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan, menjelaskan bahwa evaluasi diperlukan untuk memantau perkembangan pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan remaja. Layanan yang dipantau meliputi kegiatan di posyandu, Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah, serta layanan kesehatan remaja lainnya.

Dalam siaran pers pada Kamis (8/10/2026), Djainuddin menegaskan pentingnya data yang dapat menjadi landasan bagi penyusunan kebijakan kesehatan. "Data yang terkumpul nantinya akan dianalisis, diinterpretasikan, dan didiseminasikan sebagai baseline data," ungkapnya.

Ia menjelaskan, hasil pengolahan data tersebut diharapkan menjadi pijakan dalam merumuskan intervensi gizi terpadu di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Baubau. Dengan pemetaan kondisi kesehatan yang lebih terarah, risiko gangguan gizi pada remaja diharapkan dapat dikenali lebih awal sehingga penanganannya tidak hanya berfokus pada masa kehamilan dan

balita.

Penelitian bertajuk "Surveilans Kesehatan Remaja di Posyandu Menggunakan Aplikasi REMILA sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Kota Baubau" itu dipimpin Rasmaniar, SKM., M.Kes., sebagai ketua tim. Ia didampingi anggota peneliti Euis Nurlaela, S.Gz., M.Kes., dan Kas-mawati, S.Gz., M.Kes.

Monev juga melibatkan para pemegang program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) dari seluruh puskesmas se-Kota Baubau serta tim kerja bidang Kesehatan Masyarakat yang menangani program gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Pelibatan lintas layanan tersebut dimaksudkan untuk mendukung integrasi informasi kesehatan remaja dari berbagai titik pelayanan.

Upaya tersebut sejalan dengan tantangan penurunan stunting di tingkat nasional. Kementerian Kesehatan mencatat prevalensi stunting Indonesia turun dari 21,5 persen pada 2023 menjadi 19,8 persen pada 2024 berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024. Data itu menunjukkan kemajuan, tetapi pencegahan tetap memerlukan

intervensi berkelanjutan dan berbasis bukti.

Secara historis, pencegahan anemia pada remaja putri juga telah menjadi bagian dari agenda kesehatan masyarakat Indonesia sejak pemerintah menerbitkan kebijakan suplementasi zat besi dan asam folat pada 1997. Kajian yang diterbitkan dalam jurnal BMJ pada 2018 mencatat perkembangan kebijakan tersebut serta pentingnya kolaborasi sekolah dan sektor kesehatan dalam pelaksanaan suplementasi zat besi mingguan. Pengalaman itu memperlihatkan bahwa pencegahan masalah gizi membutuhkan kesinambungan program, pemantauan, dan keterlibatan berbagai pihak.

Melalui evaluasi REMILA, Dinas Kesehatan Kota Baubau dan tim peneliti berharap data kesehatan remaja dapat dimanfaatkan sebagai dasar intervensi dini yang lebih terarah dan berkelanjutan. Integrasi pencatatan dari posyandu dan sekolah diharapkan membantu memperkuat upaya pencegahan stunting sejak usia remaja, meskipun efektivitas aplikasi tersebut tetap perlu dinilai berdasarkan kualitas data dan hasil penerapannya. (*)

Kemenkes Tegaskan Imunisasi Berlanjut Usai Kajian KIPI Bayi di Kabupaten Kampar



Laporan: Ardi

JAKARTA, BP- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan program imunisasi nasional tetap berjalan sesuai jadwal setelah kajian terhadap kasus dugaan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) serius yang menimpa seorang bayi perempuan berusia tiga bulan di Kabupaten Kampar, Riau. Hasil kajian menyatakan kejadian tersebut inkonsisten dengan reaksi akibat vaksin dan berkaitan dengan kondisi penyerta di luar vaksinasi.

Ketua Komnas KIPI, Prof. Dr. dr. Hindra Irawan Satari, mengatakan pemeriksaan medis menemukan pneumonia atau infeksi paru-paru yang disertai sepsis, yakni respons serius tubuh terhadap infeksi. Berdasarkan hasil investigasi dan kajian kausalitas yang dilakukan pada 27 Agustus 2026, bukti yang tersedia belum menunjukkan hubungan sebab-akibat antara pemberian vaksin dan kejadian yang dialami bayi tersebut.

"Berdasarkan informasi dan hasil pemeriksaan yang tersedia, tidak ditemukan bukti bahwa vaksinasi menyebabkan kejadian tersebut," ujar Hindra dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Peristiwa itu bermula ketika bayi menerima imunisasi DPT-Hb-Hib dosis kedua, PCV dosis pertama, OPV dosis ketiga, dan Rotavirus dosis kedua di Posyandu Melati, Bangkinang Kota, pada 20 Agustus 2026. Sekitar tujuh jam setelah imunisasi, bayi mengalami demam, kemudian sesak napas dan kejang berulang. Ia selanjutnya dibawa ke RSUD Bangkinang untuk mendapatkan penanganan medis dan menjalani perawatan intensif sebelum meninggal dunia pada 22 Agustus 2026.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Riau bersama Komda KIPI Provinsi Riau dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar melakukan penelusuran terhadap kondisi pasien, mengunjungi keluarga, mengumpulkan informasi klinis, serta memeriksa data

pelayanan imunisasi. Penelaahan juga mencakup vaksin yang digunakan dan pengelolaan rantai dingin untuk memastikan prosedur penyimpanan serta penanganan vaksin sesuai ketentuan.

Direktur Imunisasi Kemenkes, dr. Indri Yogyaswari, menegaskan bahwa kejadian kesehatan yang muncul setelah imunisasi perlu dinilai melalui pemeriksaan medis dan bukti ilmiah, bukan semata-mata berdasarkan urutan waktu kejadian. Ia juga mengajak orang tua tetap melengkapi imunisasi anak sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah.

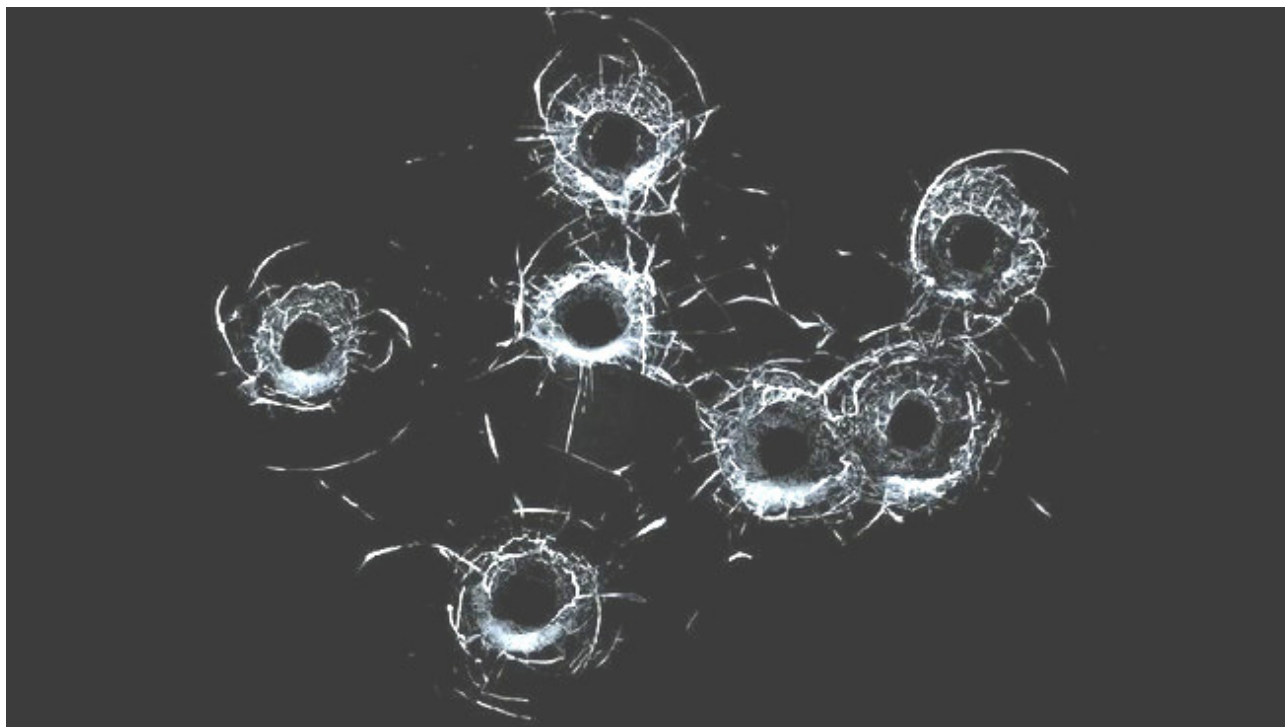
"Imunisasi merupakan salah satu upaya kesehatan masyarakat yang terbukti efektif dalam melindungi anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi," kata Indri. Ia menambahkan, Bulan Imunisasi Kejar berlangsung pada 1-31 Oktober 2026 untuk meningkatkan perlindungan bagi anak yang belum memperoleh imunisasi sesuai jadwal.

Dalam konteks sejarah kesehatan masyarakat, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) meluncurkan Expanded Programme on Immunization (EPI) pada 1974 untuk memperluas akses vaksin penyelamat jiwa bagi anak-anak di seluruh dunia. Program tersebut menjadi landasan pengembangan upaya imunisasi yang kini mencakup perlindungan terhadap lebih banyak penyakit dan kelompok usia. WHO mencatat bahwa dalam lima dekade sejak peluncuran EPI hingga 2024, vaksinasi telah menyelamatkan sekitar 154 juta jiwa. Data historis ini menunjukkan pentingnya imunisasi sebagai intervensi kesehatan masyarakat, sekaligus perlunya menjaga akses, mutu pelayanan, dan pemantauan keamanan vaksin.

Kemenkes menyatakan keamanan vaksin dalam program nasional terus diawasi melalui evaluasi sesuai ketentuan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta sistem surveilans KIPI. Pemerintah daerah juga didorong memperkuat pembinaan tenaga kesehatan, penerapan standar operasional prosedur, skrining penerima imunisasi, observasi setelah pemberian vaksin, penanganan kejadian yang diduga berkaitan dengan imunisasi, dan mekanisme rujukan. Pemerintah mengimbau masyarakat memperoleh informasi dari sumber resmi serta melaporkan kejadian kesehatan setelah imunisasi kepada tenaga kesehatan agar dapat ditangani dan dikaji sesuai prosedur. (*)

PT FAREN GRAFIKA KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi	Pemimpin Umum: Fauzan NWA Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi Redpel: Prasetyo Korlip: Firman Redaktur: Kasrun, Rahim Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman	Layouter: Ririn Pracetak: Aditya Cetak: Jamaludin	Penerbit: PT FAREN GRAFIKA Komisaris: Erna Agule Direktur Utama: Andina Latief Manager Keuangan: Nabila DAA Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin Kepala Sirkulasi: Robi Administrasi: Salvana	Kepala Biro Wakatobi: Risman Kepala Biro Buton Utara: Kasrun Kepala Biro Buton: La Harman Kepala Biro Buton Selatan: Firman Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin Kepala Biro Sultra: Masuri Agen Baubau: Jamaluddin Agen Buton Selatan: Firman Agen Buton: Samrihan Agen Buton Utara: Kasrun Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks
Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara				

Kontak Tembak di Aifat Timur, TNI Laporkan Tiga Korban dari Kelompok OPM



Ilustrasi. Tim Patroli Gabungan TNI terlibat kontak tembak dengan kelompok OPM di Papua, mengakibatkan tiga anggota OPM tewas.

Laporan: Alwan

M A Y B R A T, BP- "Kontak tembak antara patroli gabungan TNI dan kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap IV/Sorong Raya di Distrik Aifat Timur, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, Jumat (9/10/2026), dilaporkan menewaskan tiga orang dari kelompok tersebut. Aparat juga mengamankan senjata api, munisi, telepon seluler, serta sejumlah barang lain dari lokasi kejadian.

Peristiwa itu berlangsung di kawasan hutan sebelah utara Kampung Kamat ketika personel gabungan melaksanakan pengamanan wilayah. Berdasarkan laporan sementara, tidak ada personel TNI yang menjadi korban dalam kontak tembak tersebut.

Satu dari tiga korban dilaporkan telah teridentifikasi sebagai Manfret Fatem, yang disebut menjabat sebagai Danops OPM Kodap IV/Sorong Raya. Sementara itu, identitas dua korban lainnya masih didalami. Informasi awal dari aparat menyebutkan keduanya diduga bernama Yesias Fatem, yang

disebut menjabat sebagai Danyon Mosata Kodap IV/Soraya, dan Antonius Assem alias Anton Fatem, yang disebut menjabat sebagai Danyon Ayosami Kodap IV/Sorong Raya.

Kontak tembak tersebut melibatkan Tim Patroli Gabungan Denkul 4/Satgas Rajawali V bersama Satgas Yonif 9 Marinir. Dalam kegiatan pengamanan itu, aparat melaporkan penyitaan satu pucuk senjata api jenis AK-101, 30 butir munisi kaliber 5,56 milimeter, munisi kaliber 9 milimeter yang jumlahnya belum dirinci, dua unit telepon seluler, atribut OPM, bendera Bintang Kejora, satu dokumen OPM, serta perlengkapan pendukung lainnya.

Panglima Komando Operasi TNI Habema Brigjen Riyanto menyatakan bahwa pelaksanaan pengamanan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan hukum dan aturan pelibatan yang berlaku. Ia menekankan pentingnya penanganan ancaman secara terukur dengan tetap memperhatikan keselamatan masyarakat.

"Setiap ancaman terhadap keselamatan masyarakat dan aparat harus

ditangani secara tegas, profesional, dan terukur," kata Riyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (9/10/2026).

Koops TNI Habema menyatakan pengamanan di wilayah tersebut akan berlanjut untuk menjaga stabilitas keamanan dan melindungi warga dari dampak kekerasan. Selain operasi keamanan, pendekatan dialog, pembinaan teritorial, serta kerja sama dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat disebut tetap menjadi bagian dari upaya menciptakan kondisi yang aman dan damai.

Insiden di Maybrat itu berlangsung dalam konteks konflik bersenjata Papua yang telah berjalan selama beberapa dekade. Secara historis, Organisasi Papua Merdeka mulai muncul sebagai gerakan perlawanan pada 1960-an, dengan salah satu tonggak awalnya berupa pemberontakan bersenjata di Manokwari pada Juli 1965. Konflik kemudian berkembang dalam berbagai bentuk dan melibatkan persoalan politik, keamanan, serta hubungan antara pemerintah dan sebagian kelompok masyarakat Papua. Hu-

man Rights Watch mencatat bahwa konflik berkepanjangan tersebut juga menimbulkan risiko terhadap keselamatan warga sipil dan kebebasan masyarakat.

Di wilayah Maybrat, laporan yang menjadi latar belakang pemberitaan ini juga menyebut insiden sebelumnya di Kampung Sorry. Peristiwa tersebut dilaporkan mengakibatkan dua personel Marinir meninggal dunia dan dua pucuk senjata api milik TNI dibawa oleh kelompok bersenjata. Rangkaian kejadian itu disebut berdampak terhadap rasa aman warga, pelayanan publik, dan aktivitas pembangunan di sejumlah wilayah.

Meski demikian, informasi mengenai identitas ketiga korban, jabatan mereka dalam struktur kelompok, serta barang bukti yang disita dalam kontak tembak terbaru perlu merujuk pada hasil pemeriksaan dan konfirmasi resmi aparat. Verifikasi tersebut penting agar pemberitaan mengenai konflik bersenjata tetap akurat, berimbang, dan tidak mencampuradukkan dugaan awal dengan fakta yang telah dipastikan. (*)

Penggerebekan Kampung Ambon dan Boncos, Polisi Tangkap 24 Orang di Jakarta Barat



Laporan: Hadi

J A K A R T A, BP- Sebanyak 24 orang diamankan polisi dalam operasi pemberantasan narkoba di Kampung Ambon dan Kampung Boncos, Jakarta Barat, Jumat (9/10/2026) pagi. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menyita sabu, ganja, etomidate, timbangan, alat isap narkoba, serta sejumlah senjata tajam dan benda yang berpotensi digunakan sebagai senjata.

Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Bismo Teguh Prakoso mengatakan, orang-orang yang diamankan berasal dari dua lokasi berbeda. Sebanyak 16 orang diamankan dari Kampung Ambon, sedangkan delapan lainnya berasal dari Kampung Boncos. Polisi masih menyelidiki dugaan keterlibatan mereka dalam aktivitas terkait narkoba.

"Dari Kampung Boncos ada delapan orang, kemudian dari Kampung Ambon ada 16 orang," kata Bismo saat memberikan keterangan di Kampung Ambon, Daan Mogot, Jakarta Barat, Jumat (9/10/2026).

Penggerebekan berlangsung menegangkan ketika sejumlah orang berusaha menghindari petugas. Sebagian di antaranya dilaporkan melarikan diri ke sungai

sebelum akhirnya diamankan. Polisi kemudian membawa orang-orang tersebut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Selain memeriksa dugaan keterlibatan mereka dalam peredaran narkoba, penyidik berencana melakukan tes urine terhadap orang-orang yang diamankan. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari proses penyelidikan untuk mendalami kemungkinan penyalahgunaan narkoba. Hingga informasi ini disampaikan, belum ada keterangan mengenai hasil tes urine maupun penetapan tersangka terhadap seluruh orang yang diamankan.

Barang bukti yang ditemukan mencakup sabu, ganja, etomidate, timbangan, bong atau alat isap, serta senjata tajam berupa keris dan tombak. Petugas juga menemukan busur dan anak panah. Polisi masih perlu mendalami keterkaitan setiap barang bukti dengan dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki.

Operasi di kedua lokasi tersebut dipimpin Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Kristian Parluhutan Siagian. Kristian menyatakan, penggerebekan merupakan bagian dari operasi pemberantasan

narkoba yang dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyebut langkah tersebut sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Kapolri Jenderal Suyudi untuk menindak peredaran narkoba.

"Saat ini operasi kami lakukan di seluruh Indonesia, serentak. Arahan presiden kepada Kapolri sudah jelas kami maknai dan kami tidak tidur," ujar Kristian.

Pemberantasan narkoba di Indonesia memiliki landasan sejarah panjang. Pemerintah mulai memperkuat koordinasi penanganan penyalahgunaan narkoba melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika menjadi salah satu tonggak pengaturan hukum nasional sebelum digantikan oleh peraturan berikutnya. Pada tingkat internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Konvensi Tunggal tentang Narkotika pada 1961 untuk memperkuat pengendalian narkotika dan kerja sama antarnegara dalam menghadapi perdagangan gelap. (*)

Pembangunan Tiga Gedung Baru di RSUD Buton Selatan Dikebut Selesai Desember 2026, Layanan Jantung dan Kanker Disiapkan, Alat Medis Datang Tahun 2027

setelah kontrak ditan-datangani pada akhir Juli 2026 dan pekerjaan fisik berjalan sejak awal Agustus. Gedung CT Scan dan Sitotoksik dijadwalkan selesai pada 20-30 November 2026, sedangkan gedung CAT Lab ditargetkan rampung pada 18 Desember 2026. Peralatan medis untuk ketiga fasilitas itu direncanakan dikirim langsung dari pemerintah pusat pada 2027, dengan jaminan pemeliharaan selama tujuh tahun.

“Harapan kami dalam dua tahun ke depan, gedung, alat, dan tenaga medis sudah siap semua. Saat itu tiba, kita tidak perlu lagi mengirim pasien ke luar daerah. Semua bisa ditangani di sini,” ujar Dendri kepada Baubau Post, Selasa (6/10/2026).

Namun, kesiapan infrastruktur belum sepenuhnya diikuti

ketersediaan dokter spesialis. Sejumlah dokter berstatus pegawai negeri sipil masih menempuh pendidikan spesialis, sebagian berada di semester lima dan enam, dengan perkiraan kelulusan paling cepat pada akhir 2027 hingga awal 2028. Untuk menjaga pelayanan, RSUD telah bekerja sama dengan dokter spesialis saraf berstatus kontrak, sedangkan dokter spesialis jantung masih dalam proses pencarian. “Dokter spesialis saraf sudah ada yang berkontrak. Untuk dokter jantung sedang kami cari,” kata Dendri.

Selama ini, keterbatasan gedung, peralatan, dan tenaga ahli membuat pasien dengan kebutuhan penanganan tertentu harus dirujuk ke Baubau. Jarak perjalanan tersebut dapat menambah beban pasien dan kel-

uarga, terutama ketika membutuhkan layanan lanjutan. Karena itu, pembangunan fasilitas baru perlu diikuti kesiapan tenaga medis, operasional peralatan, serta sistem pelayanan yang memadai agar target pengurangan rujukan dapat tercapai.

Upaya memperluas akses layanan kesehatan tersebut sejalan dengan arah kebijakan kesehatan dunia. Pada 1978, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF menyelenggarakan Konferensi Internasional tentang Pelayanan Kesehatan Primer di Alma-Ata, yang menegaskan pentingnya akses kesehatan bagi seluruh masyarakat. Komitmen itu diperbarui melalui Deklarasi Astana pada 2018. Dalam konteks Indonesia, Kementerian Kesehatan juga menerbitkan pedoman penetapan rumah sakit

rujukan nasional pada 2014. Sejarah kebijakan tersebut menunjukkan pentingnya keterhubungan layanan kesehatan, mulai dari fasilitas dasar hingga rumah sakit dengan kemampuan penanganan yang lebih kompleks.

Selain menyelesaikan tiga gedung tersebut, RSUD Buton Selatan merencanakan pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) yang diharapkan terealisasi pada 2028. Rencana ini menjadi bagian dari pengembangan fasilitas kesehatan daerah, sementara keberhasilan peningkatan layanan tetap bergantung pada penyelesaian pembangunan, ketersediaan alat, pemenuhan dokter spesialis, dan kesiapan operasional rumah sakit. (*)

Pimpin SMAN 1 Baubau, Samsuriati Prioritaskan Disiplin dan Kebersihan Lebih Dulu, Kemudian Siapkan Pemulihan Prestasi Hingga Tingkat Nasional

gan itu merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, S.E., yang diterimanya setelah pelantikan.

Dalam apel pagi yang diikuti sekitar 1.300 siswa dan seluruh dewan guru, Samsuriati memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan agenda pembenahan sekolah. Setelah apel, ia meninjau dan mendokumentasikan kondisi sejumlah area sekolah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu dibenahi. “Saya berharap semuanya mendukung agar target kebersihan, kerapian, dan kenyamanan sekolah dapat terwujud dalam waktu satu bulan,” ujarnya kepada Baubau Post, Rabu (7/10/2026).

Ia menegaskan, pembenahan lingkungan tidak dapat dibebankan hanya kepada petugas kebersihan. Seluruh warga sekolah perlu membangun kebiasaan menjaga fasilitas dan membuang sampah pada tempatnya. “Keberhasilan sekolah adalah tanggung jawab kita bersama,” kata Samsuriati.

Di luar pembenahan fisik, tantangan berikutnya ialah meningkatkan kembali capaian SMA Negeri 1 Baubau dalam kompetisi ting-

kat nasional. Pada 2018, sekolah tersebut mengirimkan tiga dari delapan bidang studi yang lolos ke tingkat nasional, sedangkan lima bidang lainnya berasal dari SMA Negeri 2 Baubau. Meski masih mendominasi capaian di tingkat Kota Baubau, dalam tiga tahun terakhir peserta SMA Negeri 1 Baubau belum berhasil menembus tingkat nasional pada ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), dan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N).

Samsuriati menyatakan akan mempertahankan capaian yang telah dibangun para pendahulunya sekaligus mendorong peningkatan prestasi siswa. “Saya akan mempertahankan seluruh prestasi yang telah diraih pendahulu, sekaligus berjuang mengembangkan kejayaan SMA Negeri 1 Baubau agar kembali mampu bersaing hingga ke tingkat nasional,” ujarnya.

Sebelum memimpin sekolah tersebut, Samsuriati telah menempuh sejumlah tahapan pengembangan kompetensi. Ia meraih sertifikat Cakep pada 2017, lulus sebagai Guru Penggerak pada

2022, lulus BCKS pada 2025, serta mengikuti asesmen calon kepala sekolah yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada 2026. Untuk dua bulan pertama, program kerjanya disusun bertahap: bulan pertama berfokus pada kebersihan, kerapian, dan kenyamanan sekolah, sedangkan bulan kedua diarahkan pada penegakan disiplin secara menyeluruh serta penguatan karakter siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler.

Pembenahan tersebut sejalan dengan perhatian dunia pendidikan terhadap lingkungan belajar yang aman, tertib, dan mendukung perkembangan siswa. Namun, pemulihan prestasi SMA Negeri 1 Baubau tetap membutuhkan evaluasi capaian, pembinaan siswa, serta dukungan guru dan orang tua. Keberhasilan program itu akan terlihat dari konsistensi pelaksanaan pembenahan dan kemampuan siswa kembali meraih hasil kompetisi yang lebih tinggi. (*)

DAL Sekolah Rakyat Buton Selatan tidak hanya menyangkut kesiapan pembangunan secara fisik, tetapi juga kepastian lahan, perlindungan lingkungan, serta dampak sosialnya. Melalui rapat TUKLH yang melibatkan unsur pemerintahan, PUPR, sosial, akademisi, dan instansi terkait, seluruh aspek tersebut diharapkan dapat diuji secara menyeluruh sebelum pembangunan dilanjutkan. (*)

Meriahkan HUT Baubau ke 485, Dinas Perikanan Gelar Lomba Dayung Koli-koli dan Perahu Hias, 71 Peserta Sudah Mendaftar

dekatan dengan kehidupan laut.

Kepala Dinas Perikanan Kota Baubau, Yulia Widiarti, S.T., M.Si., mengatakan pihaknya bertanggung jawab mengoordinasikan kedua perlombaan tersebut. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah ingin memberi kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam perayaan hari jadi kota. “Perayaan lomba ini merupakan rangkaian HUT Kota Baubau yang melibatkan seluruh masyarakat, khususnya masyarakat pesisir. Kami memberikan ruang kepada mereka untuk berpartisipasi dan bersama-sama memeriahkan hari jadi kota,” ujarnya.

Bagi masyarakat pesisir Baubau, dayung koli-koli bukan sekadar sarana perlombaan, melainkan bagian dari tradisi yang berkaitan dengan aktivitas bahari. Karena itu, penyelenggaraan lomba diharapkan dapat menjaga keberlanjutan olahraga tradisional tersebut sekaligus mempererat hubungan sosial antarnelayan dan warga pesisir.

Untuk mendukung pelaksanaan lomba, Dinas Perikanan menyiapkan 10 perahu koli-koli yang digunakan peserta secara bergantian. Peserta diperbolehkan membawa dayung sendiri sesuai kebutuhan dan strategi mendayung masing-masing. Panitia juga menyiapkan kebutuhan teknis lain untuk menunjang kelancaran kegiatan.

Perlombaan akan semakin semarak dengan esibisi tiga perahu naga yang direncanakan tampil sebagai atraksi pembuka atau hiburan. Kehadiran perahu naga diharapkan menambah daya tarik acara dan memperkenalkan olahraga dayung kepada masyarakat yang lebih luas.

Yulia menegaskan bahwa tujuan kegiatan tidak hanya berorientasi pada kemenangan, tetapi juga pada sportivitas, kebersamaan, dan kegembiraan masyarakat. Ia berharap keterlibatan generasi muda dapat menjadi jalan untuk meneruskan tradisi bahari sekaligus meningkatkan perhatian terhadap potensi kelautan dan perikanan sebagai sumber penghidupan serta peluang ekonomi.

Dalam konteks yang lebih luas, pelestarian tradisi bahari sejalan dengan pentingnya laut bagi kehidupan masyarakat Indonesia sebagai negara kepulauan. Di tingkat internasional, tradisi mendayung juga berkembang dalam berbagai bentuk olahraga dan festival maritim. Melalui perayaan ini, Baubau berpeluang menghubungkan warisan lokal dengan pengembangan kegiatan budaya dan olahraga yang dapat menarik partisipasi masyarakat secara berkelanjutan. (*)

Cegah Korupsi, Kajati Sultra Dr Sugeng Riyanta Tekankan Integritas dan Pengawasan Pembangunan di Buton Tengah

gunakan, hingga pertanggungjawaban. Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Inspektorat juga dinilai penting, disertai koordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai kewenangan, termasuk pemanfaatan pendampingan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara.

Sugeng turut mengingatkan pejabat agar menghindari konflik kepentingan, intervensi yang menyimpang, rekayasa administrasi, pembayaran yang tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan, serta pembiaran terhadap pelanggaran. Ia juga menegaskan bahwa program pemerintah tidak boleh dijadikan sarana memperoleh keuntungan pribadi. Langkah pencegahan tersebut sejalan dengan prinsip pemberantasan korupsi yang menempatkan transparansi, pengawasan, dan pertanggungjawaban sebagai bagian penting dari tata kelola pemerintahan.

Sementara itu, Bupati Buton Tengah Azhari memaparkan agenda pembangunan daerah yang bertumpu pada potensi kelautan dan perikanan, antara lain lobster, ikan teri, dan kepiting rajungan. Ia juga menyampaikan gagasan Transmarine, yakni pengembangan kawasan transmigrasi berbasis potensi kelautan, serta program di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan bedah rumah.

Azhari juga menyampaikan harapan agar akses masyarakat terhadap pelayanan hukum semakin dekat melalui kehadiran fasilitas Kejaksaan dan peradilan

yang lebih mudah dijangkau. Pembekalan tersebut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara La Ode Tariale, Kepala Kejaksaan Negeri Buton Sterry Fendy Andih, Kapolres Buton Tengah AKBP Wahyu Adi Waluyo, serta pejabat sekretaris daerah, asisten, staf ahli, dan jajaran pemerintah daerah lainnya. Kegiatan dirangkaikan dengan penyerahan simbolis sertifikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada warga Kelurahan Watulea, Kecamatan Gu.

Penguatan tata kelola tersebut memiliki relevansi dengan agenda pemberantasan korupsi di tingkat nasional maupun internasional. Di Indonesia, reformasi kelembagaan setelah 1998 menjadi salah satu tonggak penguatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, termasuk melalui pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2002. Secara internasional, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (UNCAC), yang diadopsi pada 2003, menekankan pentingnya pencegahan korupsi, integritas sektor publik, dan pertanggungjawaban. Dalam konteks Buton Tengah, Pemkab berkomitmen memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum agar pembangunan berjalan sesuai ketentuan, efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. (*)

Kepala Kantah Buton Selatan Asnani Tekankan Aspek Pertanahan dalam Pembahasan KA-ANDAL Sekolah Rakyat

di kelurahan Todombulu, Kecamatan Sam-polawa. Penegasan itu disampaikan dalam rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (TUKLH) yang membahas Formulir Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) di Aula Kantor Bupati Buton Selatan.

Asnani menilai aspek pertanahan harus dipastikan sejak tahap perencanaan agar pembangunan tidak meny-

isakan persoalan hukum maupun memicu persepsi negatif di tengah masyarakat. “Apabila status lahan tidak diklirkan atau belum jelas, dikhawatirkan akan menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat,” tegasnya, Kamis 8 Oktober 2026

Rapat yang diikuti Asnani itu melibatkan akademisi, termasuk para profesor yang tergabung dalam tim pakar, serta perwakilan

instansi pemerintah pusat dan daerah. Keterlibatan lintas sektor tersebut diperlukan untuk menguji rencana pembangunan dari sisi lingkungan, hukum, teknis, dan sosial sebelum kegiatan memasuki tahapan berikutnya.

Kepastian status tanah menjadi penting karena pembangunan fasilitas publik pada prinsipnya membutuhkan kejelasan mengenai penguasaan dan penggunaan lahan. Pembahasan KA-AN-

Wali Kota Baubau Yusran Fahim Sambut Kunjori Kajati Sultra Dr Sugeng Riyanta, Dorong Sinergi Hukum dan Pembangunan



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP - Pemerintah Kota Baubau menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui sinergi dengan jajaran kejaksaan. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, S.E., saat menyambut kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Dr. Sugeng Riyanta, S.H., M.H., beserta istri dan rombongan dalam acara ramah tamah di Rumah Jabatan Wali Kota Baubau, Rabu malam (7/10/2026).

Yusran menilai, koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum diperlukan agar pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai ketentuan serta meminimalkan risiko hukum. Menurut dia, kepastian hukum dan integritas birokrasi merupakan bagian penting dalam memastikan kebijakan

pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Roda pembangunan daerah tidak akan dapat berjalan secara optimal tanpa adanya dukungan penegakan hukum yang kuat," kata Yusran dalam sambutannya. Ia juga menyampaikan bahwa hubungan Pemerintah Kota Baubau dengan Kejaksaan Negeri Baubau, di bawah koordinasi Kajati Sultra, selama ini berlangsung harmonis, terutama dalam upaya pencegahan risiko hukum dan mendorong transparansi birokrasi.

Selain bidang penegakan hukum, Pemkot Baubau mengapresiasi inisiatif sosial dan kemanusiaan yang digagas Kajati Sultra, termasuk program gotong royong bedah rumah bagi masyarakat prasejahtera. Program tersebut dipandang sejalan dengan upaya membantu warga yang membutuhkan dan memperkuat kolaborasi dalam penanganan persoalan sosial.

Wali kota berharap

kunjungan tersebut tidak berhenti pada agenda seremonial, tetapi berlanjut melalui koordinasi dan pendampingan yang berkesinambungan. Ia mengharapkan arahan serta masukan konstruktif dari Kajati Sultra agar kebijakan dan proyek strategis di Baubau tetap berada dalam koridor hukum dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel juga memiliki konteks nasional dan internasional. Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 27 Desember 2002. Di tingkat internasional, Indonesia mengesahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Kedua tonggak tersebut menjadi bagian dari kerangka hukum pemberantasan korupsi dan pencegahan penyimpangan

yang relevan dengan upaya memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam konteks Baubau, sinergi pemerintah daerah dan kejaksaan diharapkan mendukung pelaksanaan yang tertib hukum sekaligus memperkuat kepercayaan publik. Baubau sendiri memiliki identitas sejarah dan budaya yang berkaitan erat dengan peninggalan Kesultanan Buton, sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.

Melalui pertemuan tersebut, Pemkot Baubau menyatakan harapannya agar komunikasi dengan Kajati Sultra terus terpelihara, baik dalam pencegahan persoalan hukum maupun dalam mendukung program sosial kemasyarakatan. Kolaborasi itu diharapkan dapat memastikan pembangunan berlangsung sesuai aturan dan manfaatnya dirasakan secara luas oleh warga. (*)

Kajati Sultra Dr Sugeng Riyanta Ajak Pemkot Baubau dan Forkopimda Kawal Asta Cita Prabowo Lewat Kolaborasi



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Tenggara, Dr. Sugeng Riyanta, S.H., M.H., mengajak Pemerintah Kota Baubau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyelenggarakan program pembangunan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan menghilangkan ego sektoral agar pembangunan daerah sejalan dengan prioritas nasional.

Pesan tersebut disampaikan Sugeng saat menghadiri ramah tamah bersama Wali Kota Baubau dan jajaran Forkopimda di Baubau, Rabu malam (7/10/2026). Kunjungan itu merupakan agenda kerja pertamanya sejak dilantik sebagai Kajati Sultra, setelah sebelumnya mengunjungi Kabupaten Muna, Muna Barat, dan Buton Tengah.

Menurut Sugeng, pemerintah pusat dan daerah harus bergerak dalam satu arah untuk mencapai tujuan bernegara, sebagaimana tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Keselarasan tersebut

diperlukan agar kebijakan pemerintah kota dan kabupaten dapat mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melindungi bangsa, serta mencerdaskan kehidupan rakyat.

Ia menilai, perbedaan visi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah masih menjadi tantangan, terutama ketika program kepala daerah tidak selaras dengan prioritas nasional. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan transfer ke daerah, pemerintah daerah perlu memahami program prioritas Presiden agar perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran dan berpeluang memperoleh dukungan anggaran.

"Tidak ada kata lain sekarang untuk mewujudkan cita-cita tadi kecuali berkolaborasi. Tidak ada lagi ego sektoral, tidak ada lagi berbicara saya, tetapi berbicara kita," tegas Sugeng. Ia mengapresiasi kekompakan Wali Kota Baubau dan Forkopimda yang dinilainya sebagai modal penting untuk mendorong kemajuan kota.

Selain mendorong sinergi pembangunan, Sugeng menegaskan kesiapan Kejaksaan mendukung kebijakan pemerintah daerah

melalui fungsi penegakan hukum dan pendampingan hukum sebagai pengacara negara. Ia meminta jajaran Pemkot Baubau tidak ragu berkonsultasi dengan kejaksaan apabila menghadapi persoalan hukum dalam perencanaan atau pelaksanaan program, termasuk untuk memperoleh pendapat hukum sebagai langkah mitigasi risiko.

Sugeng juga menyoroti pendekatan penegakan hukum yang mengedepankan pemulihan dan penyelesaian masalah secara proporsional. Menurut dia, keadilan restoratif dapat menjadi pilihan dalam perkara yang memenuhi persyaratan hukum, dengan mengutamakan pemulihan hubungan sosial dan nilai gotong royong. Penyelesaian di tingkat masyarakat tetap harus memperhatikan kewenangan aparat serta ketentuan hukum yang berlaku.

Di akhir sambutannya, Sugeng menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemkot Baubau. Ia dijadwalkan menginap selama dua malam di Baubau sebelum melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Buton dan Buton Selatan, kemudian kembali ke Makassar melalui jalur udara pada Jumat (9/10/2026). (*)